

**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH**

**20
23**

**DINAS SOSIAL
KABUPATEN
POLEWALI MANDAR**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Tahun 2023. Penyusunan LAKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024.

Metode dan teknik penyusunan LAKIP ini berpedoman pada Peraturan Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan laporan kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan dan sebagai tolak ukur sinkronisasi antara rencana kinerja dan realisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan ini masih jauh dari sempurna, baik secara kinerjamaupun pelaporannya. Karenanya segala masukan kritik dan saran membangun tentulah menjadi bahan perbaikan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Polewali, 31 Januari 2024



H. AZWAR JASIN, S. Sos., M. Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19730711 199203 1 001

DAFTAR ISI

1	BAB I PENDAHULUAN
2	Latar Belakang
2	KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
13	BAB II PERENCANAAN KINERJA
13	A. RENCANA STRATEGIS
15	B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023
17	BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN
17	A. AKUNTABILITAS KINERJA
22	B. AKUNTABILITAS KEUANGAN
46	BAB IV PENUTUP
46	A. KESIMPULAN
46	B. LANGKAH PERBAIKAN KEDEPAN
	LAMPIRAN
	-Perjanjian Kinerja Tahun 2023
	-Pengukuran Kinerja Tahun 2023
	-Realisasi Anggaran Tahun 2023

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Latar Belakang Penyusunan Laporan

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan Misi Organisasi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas sekretariat daerah merupakan perwujudan kewajiban sekretariat daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi sekretariat daerah. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggeraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 perihal yang sama. Guna mendorong Good Governance dikalangan Instansi Pemerintah, maka Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai tindak lanjut atas aturan tersebut.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berintikan pada pemberian otonomi secara penuh kepada daerah dalam menyelenggarakan berbagai kewenangan penyelenggaraan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota telah diawali dengan penataan organisasi pemerintahan kabupaten dengan membentuk Badan, Dinas dan kantor.

2. Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kab.Polewali Mandar sebagai Pelaporan kinerja dan bentuk pertanggungjawaban untuk menilai keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai sasasarn Program yang wajib dipenuhi, sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Sosial 2019-2024 dan dokumen penetapan kinerja

Tujuan :

- a. Memberikan Informasi Kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai

- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Sosial Kab.Polewali Mandar untuk meningkatkan kinerjanya.

3. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum Penyusunan Laporan AKIP ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- f. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Organisasi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- g. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 27 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015-2025
- i. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 44 tahun 2012 tentang Indikator kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
- j. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 43 Tahun 2012 tentang Sasaran dan Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019.
- k. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 44 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
- l. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 50 tahun 2017 tentang kedudukan, organisasi tugas pokok dan fungsi serta tata kerja dinas sosial Kabupaten Polewali Mandar.

B. Kedudukan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten dibidang sosial dan kesejahteraan sosial;
- b. Penyusunan rencana dan program dibidang sosial dan kesejahteraan sosial;

- c. Pelaksanaan pengendalian dan penanganan teknis operasional dibidang sosial, dan kesejahteraan sosial;
- d. Pelayanan umum dibidang sosial dan kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan dan pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- f. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

Tugas pokok dan fungsi

Tugas pokok dan fungsi	
Jabatan	Kepala Dinas
Tugas Pokok	Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dinas.
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan rencana kerja di Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Tenaga Kerja dan Menetapkan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi perumusan di Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Tenaga Kerja dan b. Menetapkan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi koordinasi di Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Tenaga Kerja c. Menetapkan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan d. mengevaluasi pembinaan di Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Tenaga Kerja dan e. Menyelenggarakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas. f. Membuat laporan pelaksanaan fungsi dan tugasnya. g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
Jabatan	Sekretaris
Tugas Pokok	merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dinas yang meliputi penyelenggaraan penyusunan program dan anggaran, urusan ketatausahaan serta urusan keuangan dan perlengkapan
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan program yang meliputi: penyusunan program dan anggaran; b. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan yang meliputi: urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat; c. Penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan yang meliputi: urusan pertabuharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut (laporan hasil pemeriksaan) dan perlengkapan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsi
Jabatan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Tugas Pokok	Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas yang meliputi : melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga dan protokol, surat-menjurut, karsipan, tatalaksana, perlengkapan, kepegawaian dan tugas umum lainnya
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan dan pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol serta surat menyurat; b. Pelaksanaan urusan karsipan dan dokumentasi;

	<ul style="list-style-type: none"> c. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan; d. Pelaksanaan urusan perlengkapan; e. Pelaksanaan urusan kepegawaian; f. Pengelolaan dan pelaksanaan urusan umum lainnya.
Jabatan	Sub bagian Keuangan Perencanaan dan Pelaporan
Tugas Pokok	Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas sekretariat, khususnya mengakomodir penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaporan dan khususnya dalam pengelolaan administrasi keuangan dan verifikasi terhadap penggunaan anggaran baik rutin maupun kegiatan.
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran dengan bidang lain dalam lingkungan dinas; b. Pelaksanaan pelaporan anggaran baik anggaran rutin maupun kegiatan; c. Penyusunan laporan terhadap penggunaan anggaran baik rutin maupun kegiatan; d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang anggaran; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan perintah pembayaran anggaran; g. Penyusunan laporan hasil verifikasi terhadap penggunaan anggaran baik rutin maupun kegiatan; h. Pelaksanaan pembukuan dan urusan kas termasuk penyusunan neraca keuangan dinas; i. Pengelolaan administrasi keuangan lainnya; j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi
Jabatan	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan Sosial
Tugas Pokok	Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dinas, khususnya dibidang pemberdayaan sosial, dan penanganan Fakir Miskin.
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang pemberdayaan sosial dan Penanganan Fakir Miskin; b. Penyusunan rencana dan program dibidang pemberdayaan sosial dan Penanganan Fakir Miskin; c. Pelaksanaan program dan pembinaan dibidang pemberdayaan sosial dan Penanganan Fakir Miskin; d. Penyusunan laporan kegiatan dibidang pemberdayaan sosial dan Penanganan Fakir Miskin; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsi.
Jabatan	Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial, bantuan Stimulan dan Penanganan Fakir Miskin
Tugas Pokok	Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas bidang pemberdayaan sosial, Bantuan Stimulan dan Penanganan Fakir Miskin
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pemberdayaan sosial masyarakat, bantuan stimulan dan penanganan fakir miskin; b. Penyusunan Rencana Kerja teknis dan operasional pelaksanaan pemberdayaan sosial masyarakat, bantuan stimulan dan Fakir Miskin; c. Pengendalian pelaksanaan bimbingan sosial pemberdayaan sosial dan pelayanan sosial bagi masyarakat di lingkungan kumuh;

	d. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan keluarga, KAT; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi
Jabatan	Kepala Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial
Tugas Pokok	Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas bidang perlindungan dan jaminan sosial, khususnya dibidang kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.
Fungsi	<p>a. Menyimpan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;</p> <p>b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dibidang Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;</p> <p>c. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;</p> <p>d. Penyusunan laporan kegiatan dibidang Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;</p> <p>Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.</p>
Jabatan	
Tugas Pokok	Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas bidang pemberdayaan dan rehabilitasi sosial, khususnya dibidang bina kelembagaan sosial.
Fungsi	<p>a. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang bina kelembagaan sosial;</p> <p>b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dibidang bina kelembagaan sosial meliputi: karang taruna, bina kube dan lembaga sosial lainnya;</p> <p>c. Penyusunan laporan pelaksanaan program dibidang bina kelembagaan sosial meliputi; karang taruna, bina kube dan lembaga sosial lainnya;</p> <p>d. Pelaksanaan bimbingan teknis program dibidang bina kelembagaan sosial meliputi; karang taruna, bina kube dan lembaga sosial lainnya</p> <p>Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi</p>
Jabatan	a. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Tugas Pokok	Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dinas, khususnya dibidang perlindungan dan jaminan sosial.
Fungsi	<p>a. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang perlindungan dan jaminan sosial;</p> <p>b. Penyelenggaraan penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang perlindungan dan jaminan sosial meliputi bantuan, advokasi sosial dan bantuan hukum;</p> <p>c. Penyelenggaraan penyusunan program dan kegiatan jaminan sosial dalam bentuk asuransi/bantuan langsung berkelanjutan pada; fakir miskin, anak yatim piatu , terlantar, lansia dan penyandang cacat serta penderita penyakit kronis;</p> <p>d. Pelaksanaan program dan pembinaan dibidang perlindungan dan jaminan sosial ;</p> <p>e. Penyusunan laporan kegiatan dibidang perlindungan dan jaminan sosial;</p> <p>Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi.</p>
Jabatan	e. Kepala Seksi Perlindungan Sosial
Tugas Pokok	Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas

	bidang perlindungan dan jaminan sosial, khususnya dibidang perlindungan sosial.
Fungsi	<p>a. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang perlindungan sosial;</p> <p>b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dibidang bantuan sosial bencana alam;</p> <p>c. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang bantuan sosial bencana alam;</p> <p>d. Penyusunan laporan kegiatan dibidang bantuan sosial bencana alam;</p> <p>Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.</p>
Jabatan	Kepala Seksi Jaminan Sosial
Tugas Pokok	f. Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas bidang bantuan dan jaminan sosial, khususnya dibidang jaminan kesejahteraan sosial.
Fungsi	<p>a. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang jaminan kesejahteraan sosial;</p> <p>b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dibidang jaminan kesejahteraan sosial;</p> <p>c. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang jaminan kesejahteraan sosial;</p> <p>d. Penyusunan laporan kegiatan dibidang jaminan kesejahteraan sosial;</p> <p>Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.</p>
Jabatan	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Tugas Pokok	Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dinas, khususnya dibidang Rehabilitasi sosial.
Fungsi	<p>a. Penyelenggaraan penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang Rehabilitasi Sosial;</p> <p>b. Penyelenggaraan penyusunan program dan kegiatan Rehabilitasi Sosial;</p> <p>c. Pelaksanaan program dan pembinaan dibidang Rehabilitasi sosial ;</p> <p>d. Penyusunan laporan kegiatan dibidang Rehabilitasi sosial;</p> <p>e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.</p>
Jabatan	Kepala Seksi Lansia dan Anak
Tugas Pokok	Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas seksi Sosial, Lansia dan Anak.
Fungsi	<p>a. Penyusunan petunjuk teknis Rehabilitasi Sosial, Lansia dan Anak;</p> <p>b. Penyusunan Rencana Kerja Teknis dan Operasional pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Anak;</p> <p>c. Pengendalian data dan sistem informasi kesejahteraan sosial anak dan lansia;</p> <p>d. Pengendalian pelayanan rehabilitasi sosial anak balita, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak viabilitas dan berkebutuhan khusus;</p> <p>e. Pengendalian pelayanan Rehabilitasi Sosial pengangkatan Calon Orang Tua (COTA) dan Calon Anak Angkat (COA);</p> <p>f. Pengendalian Rehabilitasi sosial lansia, meliputi kelembagaan, perlindungan dan akseptabilitas dan pelayanan sosial di dalam dan diluar panti;</p> <p>g. Pengendalian dan koordinasi teknis rehabilitasi sosial anak</p>

	<p>dan lansia Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.</p>
Jabatan	Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Disabilitas dan Panti
Tugas Pokok	Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas seksi Tuna Sosial, Disabilitas dan panti
Fungsi	<p>a. Penyusunan petunjuk teknis Rehabilitasi Tuna Sosial, Disabilitas dan panti;</p> <p>b. Penyusunan Rencana Kerja Teknis dan Operasional pelaksanaan Rehabilitasi Tuna Sosial, Disabilitas dan Panti;</p> <p>c. Pengendalian data dan sistem informasi kesejahteraan sosial Rehabilitasi Tuna Sosial, korban perdagangan orang;</p> <p>d. Pengendalian pelaksanaan pembinaan dan pelayanan rehabilitasi sosial dan bekas warga binaan;</p> <p>e. Pengendalian pelayanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza;</p> <p>f. Pengendalian Rehabilitasi sosial lansia, meliputi kelembagaan, perlindungan dan akseptabilitas dan pelayanan sosial di dalam dan diluar panti;</p> <p>g. Pengendalian dan koordinasi teknis rehabilitasi sosial anak dan lansia</p> <p>Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.</p>

Sumber Daya SKPD

Pegawai pada Dinas Sosial Kab. Polewali Mandar terdiri dari:

Tabel 2. 1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon/Pejabat

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	II	1	-	1
2.	III	2	2	4
3.	IV	5	2	7
4.	Staf	5	4	9
Jumlah		13	8	21

Tabel 2. 2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	I		-	0
2.	II	0	0	0
3.	III	10	7	17
4.	IV	3	1	4
Jumlah		13	8	21

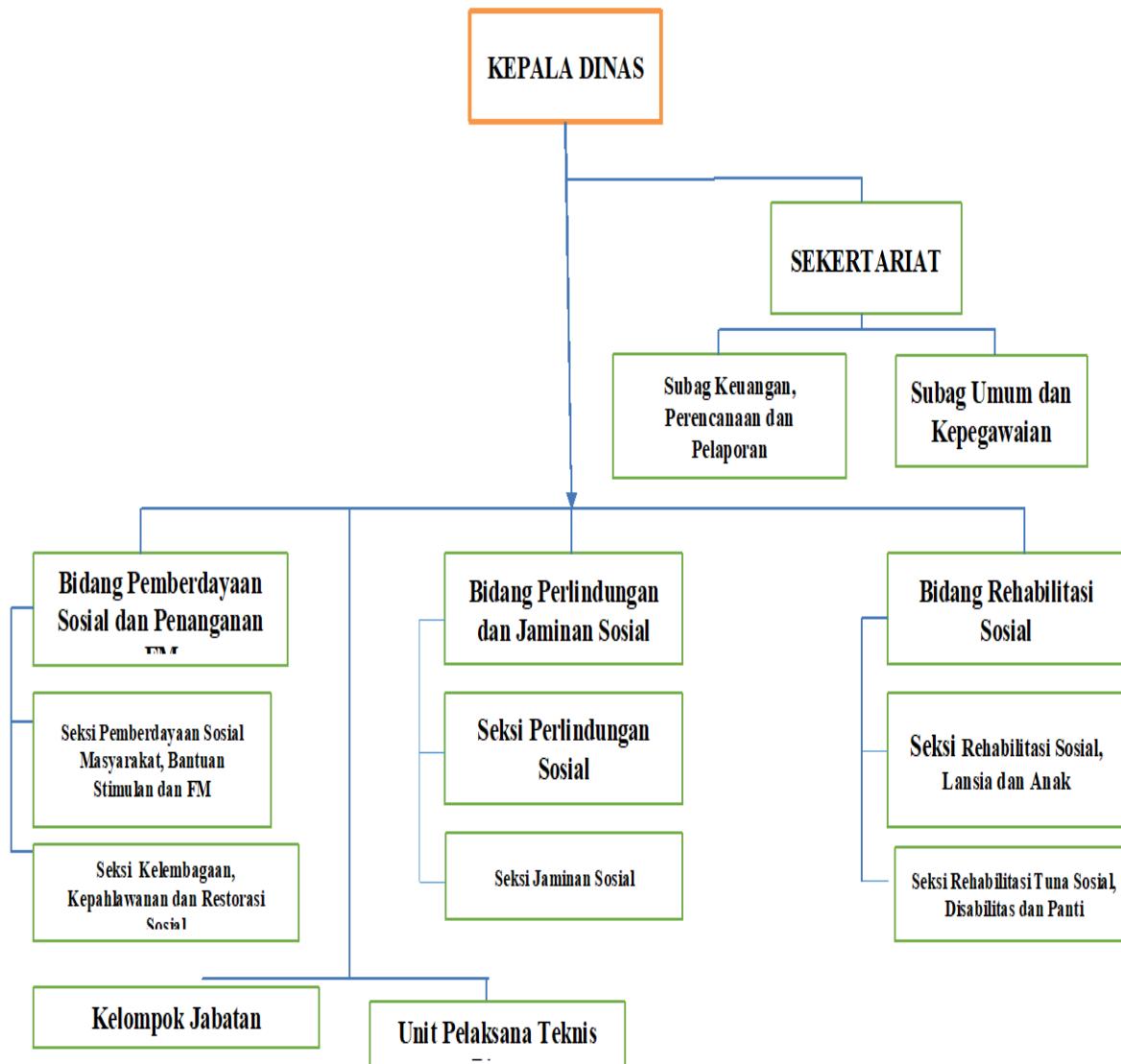
Tabel 2. 3 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	SD	0	-	0
2.	SLTP	-	-	
3.	SLTA	0	1	1
4.	Sarjana Muda	0	0	0
5.	Strata 1 (S1)	7	6	13
6.	Strata 2 (S2)	6	1	7
Jumlah		13	12	21

Gambaran Umum SKPD

Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Peraturan Bupati Polewali Mandar No. 50 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar memiliki tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang sosial yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas pertambahan yang diberikan Pemerintah.

STRUKTUR DINAS SOSIAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR



Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang dilanjutkan dengan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 31 dan Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar adalah salah satu Dinas Tekhnis yang cukup padat dengan tanggung jawab yang besar dimana didalamnya ada 3 (tiga) bidang yang harus dikoordinasikan dengan baik agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun setiap awal tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar merupakan pelaksana pemerintah kabupaten di bidang Sosial dimana Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Tugas pokok Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar telah melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang Sosial yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah.

Oleh karena itu dalam Penyusunan LAKIP ini tentu diawali dengan proses penyusunan rencana strategi, penyusunan rencana kinerja dan pengukuran kinerja. Adapun pedoman penyusunan LAKIP, mengacu pada Peraturan Menpan dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C.Isu-isu Strategis yang dihadapi

Permasalahan yang dihadapi pada Dinas Sosial adalah :

1. Kurangnya tingkat kemandirian para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Kurangnya kepedulian, partisipasi dan pemahaman masyarakat serta dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan bencana
3. Terbatasnya aparatur teknis bidang sosial
4. Peran SKPD lain kurang, terkait penanganan pemberdayaan kesejahteraan sosial
5. Belum adanya kerjasama penanganan masalah kesejahteraan sosial
6. Tidak memiliki sarana prasarana pelayanan sosial
7. Belum optimalnya potensi dari sumber dari kesejahteraan sosial
8. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar.

9. Masih banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang belum pernah tertangani.
10. Belum adanya tempat untuk menampung dan memberikan rehabilitasi hasil razia.
11. Masih kurangnya kesadaran dari penyandang masalah kesejahteraan tentang permasalahan yang dihadapi sehingga sering terjadi penolakan terhadap pelatihan yang diprogramkan oleh pemerintah untuk PMKS.
12. Masih kurangnya jumlah tenaga yang terdidik/terlatih dalam menangani masalah kesejahteraan sosial.
13. Belum adanya sarana barak penampungan hasil razia PMKS terutama untuk lansia terlantar dan gelandangan pengemis.
14. Terbatasnya tenaga terlatih di bidang kesejahteraan sosial yang terampil dalam menangani PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di lapangan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024 merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019–2024 serta dijadikan acuan / pedoman dalam menyusun Renja tahunan Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar. Rencana strategis berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, tahapan proses disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan setiap potensi maupun peluang yang ada serta hambatan yang mungkin akan timbul. Rencana strategis instansi pemerintah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, target, kebijakan, program serta pengukuran tingkat keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

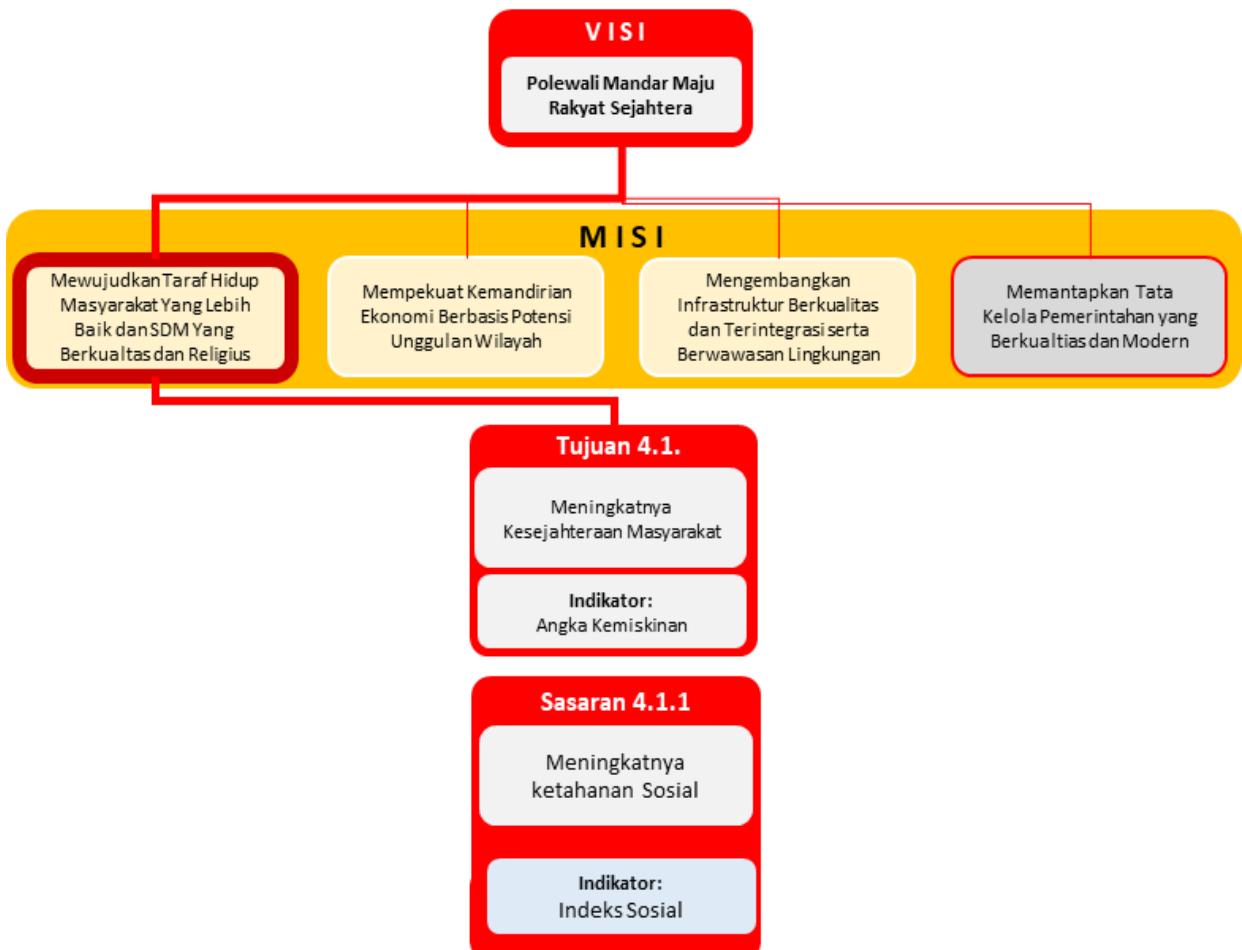
Dalam rangka menunjang pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar 2019-2024, dengan Visi Daerah “*Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera*”, yang akan dicapai melalui misi sebagai berikut :

Dimana visi tersebut dijabarkan menjadi 4 (empat) misi ;

1. Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat yang lebih baik dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan religius;
2. Memperkuat Kemandirian Ekonomi berbasis potensi unggulan wilayah;
3. Mengembangkan Infrastruktur berkualitas yang terintegrasi serta berwawasan lingkungan;
4. Memantapkan tata kelola Pemerintahan yang berkualitas dan modern.

Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar sebagai Leading Sector Pembangunan Kesejahteraan Sosial level Kabupaten masuk dalam misi 1 (satu) yaitu “**Mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius**”.

**Tabel Kolerasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Dinas Sosial Kab.Polewali Mandar**



Keterkaitan Misi dan Tujuan

Sebagaimana visi dan Misi diatas, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial mendukung pencapaian misi pertama “**Mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius**”. selaras dengan Tujuan yang akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar hingga tahun 2024 adalah Meningkatkan **Taraf Hidup Masyarakat** yang akan diukur melalui Indeks Gini Ratio Penduduk Miskin. Ditargetkan pada tahun 2024 Indeks Gini Ratio 0,321 tujuan tersebut tentu bisa dicapai dengan meningkatkan status kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Keterkaitan Tujuan,Sasaran, dan strategi

Untuk mencapai tujuan, Sasaran, Strategi sebagaimana tertuang dalam Renstra 2019-2024 maka yang menjadi sasaran adalah Penanganan

Masalah Kesejahteraan Sosial sedangkan sasaran strategi yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan adalah antara lain;

- a. Meningkatnya Kuantitas Pelayanan Kelompok Masyarakat Rentan yang ter-Rehabilitasi;
- b. Meningkatnya Kualitas Jaminan Sosial bagi PMKS Non Potensial dan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Korban Bencana;
- c. Meningkatnya Kualitas Wahana Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Miskin Potensial yang diberdayakan.
- d. Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran;
- e. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja;
- f. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah.

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 adalah sebagai berikut;

- a. Target Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar periode 2023 berdasarkan capaian sasaran strategis ;

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	TARGET 2023
1	Meningkatnya ketahanan sosial	Indeks Sosial	1	49.27
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1	Sangat Baik
3	Meningkatnya ketahanan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial	Percentase PMKS yang memiliki ketahanan sosial	1	38,00%
4	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat miskin potensi	Percentase masyarakat miskin potensi yang memiliki ketahanan sosial	1	21,00%
5	Meningkatnya ketahanan sosial PMKS non potensial dan masyarakat korban bencana	Percentase PMKS non potensial dan masyarakat korban bencana yang memiliki ketahanan sosial	1	82,00%
6	Meningkatnya peran aktif lembaga sosial dalam layanan kesejahteraan sosial	Percentase lembaga sosial yang aktif dalam pemberian layanan kesejahteraan sosial	1	100%
7	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	3	A
		Percentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah		100.00%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah		Sangat Baik

b. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar tahun 2023

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan. Hal ini penting karena memberikan arah hasil yang akan dituju. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Perjanjian Kinerja ini sekaligus merupakan Indikator Kinerja Kunci, Adapun target yang ditetapkan pada awal tahun 2023 sebagai berikut :

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	2023
1	Meningkatnya ketahanan sosial	Indeks Sosial	Meningkatnya ketahanan sosial	Indeks Sosial	49.27	
			Meningkatnya ketahanan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang memiliki ketahanan sosial	38,00 %	
			Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat miskin potensi	Persentase masyarakat miskin potensi yang memiliki ketahanan sosial		21,00%
			Meningkatnya ketahanan sosial PMKS non potensial dan masyarakat korban bencana	Persentase masyarakat korban bencana yang memiliki ketahanan sosial		100%
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik	
			Meningkatnya peran aktif lembaga sosial dalam layanan kesejahteraan sosial	Persentase lembaga sosial yang aktif dalam pemberian layanan kesejahteraan sosial		100%
			Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	A	
				Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100.00%	
				Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar selaku pengembang amanah di bidang sosial melaksanakan kewajiban ber-akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra tahun 2019-2024 maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Dan dari hasil Pengukuran Kinerja tahun 2023 Indikator kinerja sasaran sebagai alat ukur Pengukuran Keberhasilan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar dapat dinyatakan Indikator sangat berhasil dan Berhasil yaitu pada indikator 5,6 dan 7 terkategori sangat baik.

A. AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	KATEGORI
1	Meningkatnya ketahanan sosial	Indeks Sosial	49.27%	50,06 %	Baik
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
3	Meningkatnya ketahanan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang memiliki ketahanan sosial	38,00%	39.82%	Baik
4	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat miskin potensi	Persentase masyarakat miskin potensial yang memiliki ketahanan sosial	21,00%	20,08 %	Cukup Baik
5	Meningkatnya ketahanan sosial PMKS non potensial dan masyarakat korban bencana	Persentase PMKS non potensial dan masyarakat korban bencana yang memiliki ketahanan sosial	82,00%	90,3%	Sangat Baik
6	Meningkatnya peran aktif lembaga sosial dalam layanan kesejahteraan sosial	Persentase lembaga sosial yang aktif dalam pemberian layanan kesejahteraan sosial	100%	100%	Sangat Baik
7	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	A	A	Sangat Baik

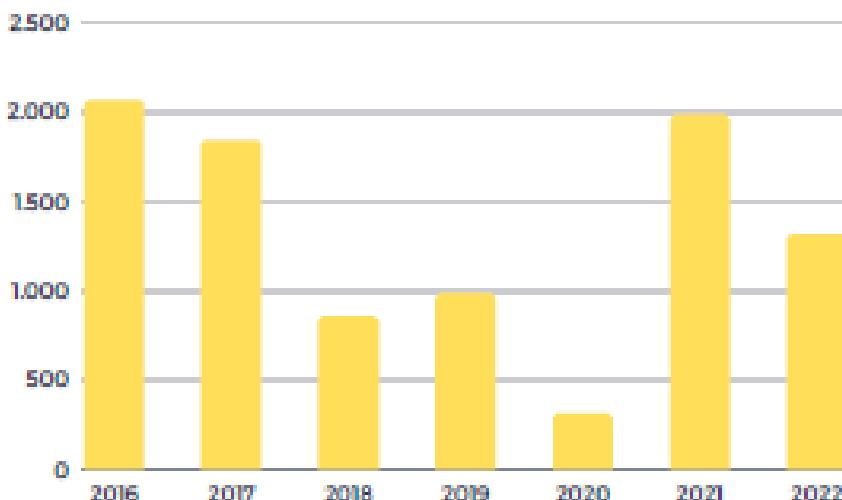
		Percentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100.00%	100.00%	Sangat Baik
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Keterangan : 0 sd 50 % = cukup baik, 50 s.d 100 % =Baik, > 100% Sangat Baik

$$\begin{aligned}
 \text{indeks Ketahanan Sosial} &= \frac{\text{percentase Capaian (Rehabilitasi Sosial + Pemberdayaan Sosial + Perlindungan dan Jaminan Sosial)}}{3} \times 100\% \\
 &= \frac{39.82 + 20.08 + 90.3}{3} \times 100\% \\
 &= \mathbf{50,06\% \text{ (capaian tahun 2023)}}
 \end{aligned}$$

STATISTIK CAPAIAN PENANGANAN PPKS

2016 - 2022



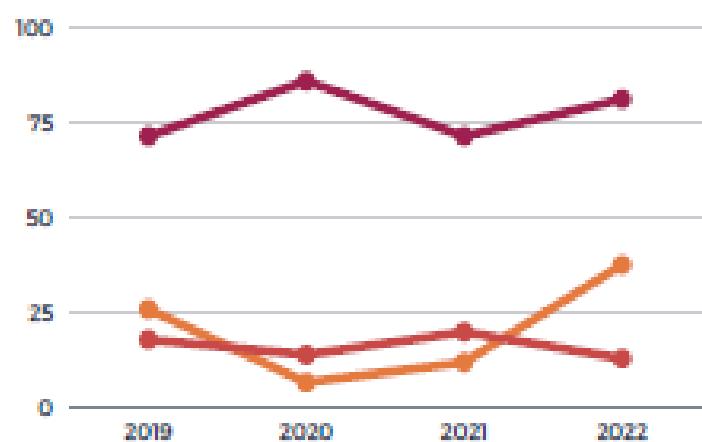
CAPAIAN 2019-2022

target capaian pada sasaran strategis tertinggi pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan terendah di Bidang Pemberdayaan Sosial

STATISTIK 2016-2022

dari grafik capaian penanganan PPKS yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar cenderung fluktuatif. hal ini sangat dipengaruhi oleh alokasi besaran Pagu yang dikelola, terendah di tahun 2020 (310) akibat refocusing anggaran dampak covid-19 dan tertinggi di tahun 2016 (2062) dan 2021 (1982)

Rehabilitasi Sosial
Pemberdayaan Sosial
Perlindungan dan Jaminan Sosial



KESIMPULAN

Pagu Anggaran yang SANGAT TERBATAS adalah faktor yang paling berpengaruh dalam pencapaian setiap indikator Sasaran strategis, Kualitas SDM Pelaksana beserta kuantitasnya menjadi faktor pendukung pencapaian target prioritas di masa yang akan datang

44,78

Target Capaian Indeks Sosial
tahun 2022

43,67

Realisasi Capaian Indeks Sosial
tahun 2022

TUJUAN 1

MENINGKATNYA KETAHANAN SOSIAL

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya ketahanan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2023
1.	Meningkatnya ketahanan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang memiliki ketahanan sosial	38.00

Dinas Sosial, indikator sasaran merupakan komposit dari indikator Kinerja Program. Ditahun 2023 target output disetiap kegiatan telah dimaksimalkan pencapaiannya , program, kegiatan maupun sub kegiatan yang ada di Bidang rehabilitasi Sosial ini diharapkan mampu memperkuat peran Dinas Sosial khusunya dalam penanganan Kelompok Rentan Lansia dan Anak serta Disabilitas, hal ini merupakan amanat **SPM WAJIB** bidang Sosial . Kegiatan Rehabilitasi Sosial PMKS yang seharusnya rangkaian sub kegiatan Penjangkauan, Advokasi lalu Pelayanan kemudian Tahap Rehabilitasi belum mampu dilaksanakan sepenuhnya. Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan bagi PMKS hanya mampu diimplementasikan berupa layanan sosial bagi Anak dalam Panti berupa penyediaan bantuan permakanan bagi Anak Terlantar. Panti yang mampu di beri layanan sosial dilakukan diluar Panti yang sebelumnya dilakukan bagi anak yg berada di dalam panti, hal ini akibat diberlakukannya/terbitnya permendagri Nomor 90 tahun 2019 dengan sasaran sejumlah 90 orang, yaitu jumlah jiwa yang ditangani dan memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 40 jiwa Lanjut Usia, 20 Anak dan 30 jiwa Disabilitas. Kelompok PMKS Disablitas ini membutuhkan penanganan khusus dan lengkap agar yang bersangkutan dapat mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain.

mengingat pentingnya Program ini adalah salah satu penyumbang terbesar pencapaian SPM di Dinas Sosial, namun dalam perkembangannya Bidang ini belum maksimal dalam menyajikan Kegiatan-kegiatan yang langsung berhubungan dengan indikator Pencapaian SPM, Keterlantaran Kelompok Masyarakat Rentan yang mencakup Lanjut Usia Terlantar dan Anak Terlantar yang masih sangat minim dalam Penjangkauan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Salah satu solusi yang bisa ditempuh untuk memacu pencapaian pada sasaran strategis dimasa yang akan datang adalah;

HAMBATAN / TANTANGAN

1. Masih Kurangnya kapasitas / Kapabilitas pelaksana Rehabilitasi
2. Layanan Pusat Rehabilitasi di tingkat Kabupaten belum ada
3. Ketersediaan Petugas yang berkompeten(Ahli psikologi) sangat sulit dilakukan mengingat keterbatasan anggaran
4. Belum tersedianya data yang tervalidasi yang mencakup total jumlah PMKS yang seharusnya mendapatkan layanan dan Rehabilitasi Sosial

SOLUSI

1. Penyelarasan pandangan antar pelaksana / Penyedia Layanan dan Rehabilitasi Sosial tentang bagaimana Pelayanan Sosial dan Rehabilitasi Sosial yang layak seharusnya dilaksanakan;
2. Penyediaan Pusat Rehabilitasi Sosial di tingkat Kabupaten
3. yang diharapkan menjangkau Kelompok Rentan khususnya di pelayanan tingkat awal terhadap masalah sosial;
4. Peningkatan Pagu Anggaran.

ANALISA PENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN

- a. Ketersediaan SDM seperti PKSAI (Pekerja Sosial Anak) sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja Program/Kegiatan. Sikap profesionalisme dan pengabdian tanpa pamrih mendampingi anak yang bermasalah dengan hukum sangat diapresiasi;
- b. Networking yang terbangun memudahkan penjangkauan bagi PMKS rentan, masyarakat yg mulai aktif serta peduli akan keadaan lingkungan sekitar sangat membantu penanganan kasus kasus yang menjadi perhatian masyarakat.

ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA (ANGGARAN)

$$\text{Persentase efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

$$= \frac{209.228.600}{209.328.400} \times 100\%$$

$$= 100\%-0,95\%$$

$$= 99,5\%$$

Dari gambaran diatas diperoleh realisasi anggaran di sasaran Strategis I ini sebesar 99.5%.

No	Sasaran strategis OPD	Indikator Sasaran Renstra	Tahun		Target	Realisasi
			2021	2022		
1	Meningkatnya Kuantitas Pelayanan Kelompok Masyarakat Rentan yang ter-Rehabilitasi	Percentase Penanganan Masalah sosial bagi Kelompok Masyarakat Rentan	6.73 %	37.08 %	38.00%	39.82%

Percentase Penanganan Masalah Sosial bagi Kelompok Masyarakat Rentan tahun 2023 diperoleh dengan rumus sebagai berikut ;

Dan ditahun 2023 jumlah PMKS yang ditangani untuk mendapatkan hasil dari persentase tersebut adalah 90 orang, yaitu jumlah jiwa yang ditangani dan memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 40 jiwa Lanjut Usia, 20 Anak dan 30 jiwa Disabilitas.

Sasaran Strategis 1 (satu) yaitu **Meningkatnya Kuantitas Pelayanan Kelompok Masyarakat Rentan yang ter-Rehabilitasi** ini terdiri atas 1 (satu) Program pendukung yaitu Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Untuk meningkatkan capaian pada Sasaran Strategis ini Program ini adalah salah satu penyumbang terbesar pencapaian SPM di Dinas Sosial, namun dalam perkembangannya Bidang ini belum maksimal dalam menyajikan antaranya adalah Pelayanan dan Rehabilitasi bagi kelompok masyarakat rentan termasuk Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar serta Disabilitas.

Jumlah Masyarakat Rentan ditangani yang diberi Pelayanan dan Rehabilitasi

X100%

Jumlah Total Masyarakat Rentan yang seharusnya ditangani

90

X100%

226

= 39.8%

Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial (Jiwa)								
Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat KP Napza lainnya bukan HIV/AIDS	0	0	0	50	0	55	25	30
Penyediaan Makanan	115	18	78	42	25	90	60	60

Tabel 3.2
Capaian Program / Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tahun 2023

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	2	3	4		5	6	7	8
1.	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	Penyediaan Permakanan	60 orang	60 orang	155.867.600	155.767.800	99,94
		Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	30 orang	30 orang	53.460.800	53.460.200	100

Serba-serbi **SASARAN STRATEGIS**

1

Meningkatnya ketahanan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial

TARGET CAPAIAN

2022 : 33.00%

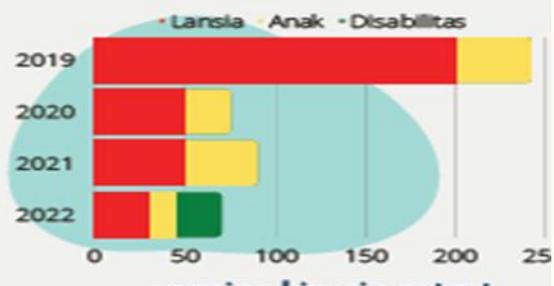
sesuai Permensos No.09 Tahun 2018 tentang **STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM)**
WAJIB BIDANG SOSIAL terdiri atas ;
85orang =20lansia + 10 anak + 15 kelompok rentan +BTT 9 lansia + 6 anak +25 disabilitas, di bagi 226 (371-145 capaian 2021)

37%



Data Perbandingan

adanya capaian yang signifikan dari tahun sebelumnya yaitu di 2021 sebesar 12.00%



• Lansia • Anak • Disabilitas
capaian kinerja output kegiatan yang sangat fluktuatif / sangat tergantung pada alokasi Pagu Anggaran yg tersebut

Dokumentasi



SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat miskin potensial

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2022
2.	Meningkatnya ketahanan sosial PMKS non potensial dan masyarakat korban bencana	Persentase PMKS non potensial dan masyarakat korban bencana yang memiliki ketahanan sosial	82%

No	Sasaran strategis OPD	Indikator Sasaran Renstra	Tahun		Target	Realisasi
			2021	2022		
2	Meningkatnya ketahanan sosial PMKS non potensial dan masyarakat korban bencana	Persentase PMKS non potensial dan masyarakat korban bencana yang memiliki ketahanan social	85.86%	71%	82%	90,3%

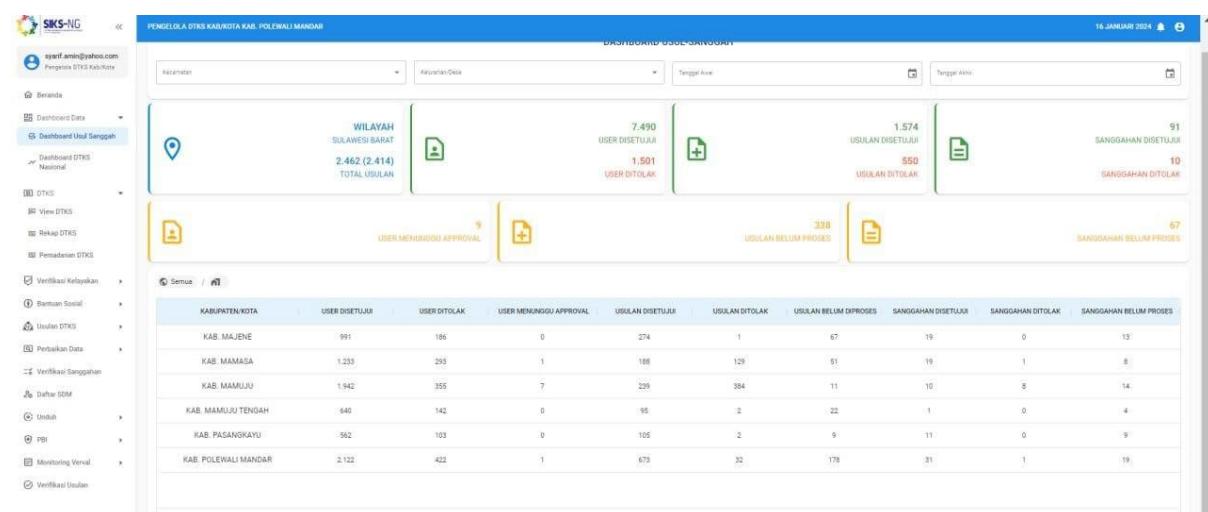
Tabel Capaian Sasaran strategis 2 tahun 2020-2023

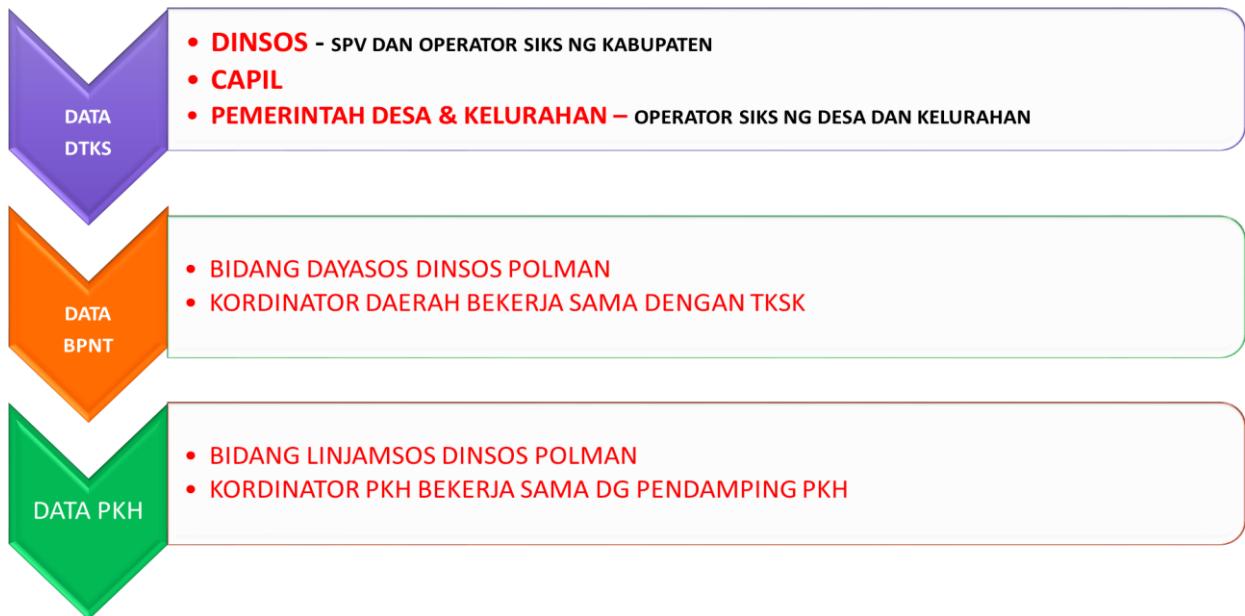
Capaian Output kegiatan bidang PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						
Kegiatan/Sub Kegiatan		2020	2021	2022	2023	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						
Penanggulangan Tanggap Darurat Korban Bencana	Kegiatan Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota sub kegiatan : Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota	174 jiwa	514 jiwa	150 Paket	150 Paket	
Verifikasi DTKS	32.000 KM					
Pemantauan Pelaksanaan Program PKH	20.099 KPM					
Pemantauan Pelaksanaan BPNT	36.079 KPM					
Bantuan/Jaminan Permakanan (kebutuhan dasar) bagi Lansia terlantar dan kelompok rentan lainnya	0	87.814 KM	71.048 KM (150 KK bantuan logistik bencana + 228 RTLH + 71.025 KK data penerima bansos yang di verifikasi)	85.159 KM (19.645 KK bantuan beras + 76.340 KK data penerima bansos yang di verifikasi)		

Persentase Masyarakat miskin yang masuk dalam cakupan Penjaminan Sosial serta Jumlah Korban Bencana Alam/Sosial yang mendapatkan bantuan Logistik masuk dalam indikator ini dan bila dilihat dari tahun ke tahun 2020 s.d 2023 jumlahnya mengalami kenaikan, mengingat keluarga yang diberikan bantuan juga bertambah jumlahnya sehingga realisasi kinerja tercapai sebesar 90,3%.

Dinas Sosial khususnya yang berada dibawah koordinasi seksi Perlindungan Sosial. Pelaksanaan kegiatan Verifikasi dan Updating Basis Data Terpadu (BDT) melalui aplikasi SIKS-NG yang menyasar 40% Masyarakat dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah diharapkan mampu menyarung Data Layak dan Tidak Layak atau lebih familyar dengan istilah Inclusion and Exclusion Error, aplikasi ini berupa menu isian pemeriksaan yang mencakup data keluarga Miskin, Data Anggota Keluarga, Pekerjaan serta data yang bersifat pribadi lainnya. Plus berisi jenis Program Bantuan yang diterima.

Pengelolaan system Jaminan Sosial juga tercakup di sub kegiatan Pengelolaan data kemiskinan tingkat Kabupaten/Kota, seiring dengan indikator Persentase Masyarakat Miskin Penerima Penjaminan Sosial. Dan ditahun 2023 target capaian yang ditetapkan adalah 82.00% seiring dengan dilaksanakannya verifikasi data kependudukan melalui basis data Nomor Induk kependudukan (NIK) bagi masyarakat yang masuk dalam Data Tingkat Kesejahteraan Sosial (DTKS) .





Program PKH dan BPNT adalah merupakan Program andalan Pemerintah yang diharapkan mampu menahan laju pertambahan angka kemiskinan dan merupakan Program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial, dimana Pandemi dimana Pemerintah pusat menyalurkan berbagai mode Paket Bantuan yang diharapkan mampu meringankan beban masyarakat terdampak pandemic Program ini menyasar Penduduk Miskin yang Datanya terangkum dalam Basis Data Terpadu (BDT) 25.021 KPM merupakan penerima PKH dan sekitar 40.493 KM adalah penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial dari Program ini diambil dari APBN sedangkan operasionalnya didapat dari sharing Dana APBD Kabupaten Polewali Mandar. Kendala pelaksanaan kegiatan ini biasanya bersifat teknis operasional yang sangat berpengaruh pada pemutakhiran besaran bantuan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Ditahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar di amanahkan untuk melaksanakan pemberian bantuan beras melalui APBD perubahan. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutusan dasarnya.

Bantuan beras ini menyasar masyarakat miskin ekstrim yang juga berada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai rujukan, hal ini dilakukan sebagai bentuk guarantee akan tepat sasaran, layak atau tidaknya masyarakat sasaran mendapatkan bantuan sosial beras ini, berdasar pada verifikasi dan validasi kelayakan sejumlah 19.645 Rumah Tangga dinyatakan layak untuk menerima bantuan beras ini.

Adapun prasyarat yg dimaksud terangkum sebagai berikut;

- a. merupakan warga Kabupaten Polewali Mandar sesuai identitas kependudukan
- b. Masyarakat berpenghasilan rendah dan masuk pada basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS);
- c. Masuk dalam kategori miskin ekstrim berdasarkan data kementerian terkait.

Berikut adalah tabel capaian persentase untuk Sasaran strategis kedua;

Tabel 3.3

Capaian Program / Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2023

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	2	3	4		5	6	7	8
1.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	74.740 KM	87.814 KM	Rp. 607.519.000	Rp, 580.626.500	95.57
2.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	18.966 KK	19.645 KK	Rp.5.632.013.800	Rp.5.631.519.400	99,99
3.	Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana	Penyediaan Makanan	150 Paket (bantuan logistic bencana)	150 Paket	Rp. 183.329.450	Rp. 183.204.305	99,96

Kegiatan Penanggulangan Bencana berupa Penyaluran Logistik bagi Korban Bencana baik Bencana Alam maupun Bencana Sosial, kesiapsiagaan dalam rangka Tanggap Darurat adalah hal mutlak, Dengan pengaktifan satuan siaga bencana (TAGANA) adalah salah salah satu upayanya. Dengan adanya TAGANA diharapkan resiko dan korban akibat bencana dapat diminimalisir, terkait kegiatan ini Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar juga berkoordinasi aktif dengan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat. Pendataan dan penyalurannya dilaksanakan langsung oleh personil TAGANA dan personil Pekerja Sosial lainnya .

HAMBATAN / TANTANGAN

1. Masih Tingginya angka jumlah Masyarakat Miskin yang belum tercover Penjaminan Kesehatan
2. Belum tersedianya Data Valid Jumlah PMKS yang layak mendapatkan penjaminan Sosial
3. Masih adanya Tumpang Tindih perihal kewenangan Pengelolaan Logistik Bencana
4. Filtering Data Penerima Bantuan Sosial seperti Rastra dan PKH masih belum maksimal sehingga Data ganda masih didapatkan
5. Jumlah Eksclusion dan Inclusion Error Penerima PKH masih tinggi

SOLUSI

1. Disarankan untuk melaksanakan koordinasi yg lebih intens kepada pihak Pemerintah Desa agar Validitas data yg akan menjadi dasar pengelolaan data di tingkat desa bisa lebih berkualitas.
2. Percepatan Verifikasi Validasi Data Kesejahteraan Sosial melalui Aplikasi SIKS-NG perlu segera dilaksanakan
3. Maksimalisasi pelaksanaan Graduasi Mandiri kepesertaan PKH
4. Konsolidasi periodik bagi seluruh pendamping lapangan yang menangani Penyaluran Bantuan Sosial mutlak diperlukan

ANALISA PENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN

1. Indikator pada level impact dan Outcome pada Sasaran Strategis ini umumnya bersifat Fisik (besaran Bantuan kepada masyarakat) serta populasi Data dan Penyaluran Logistik, sementara kegiatan yang dilaksanakan umumnya hanya dalam bentuk koordinasi atau non fisik, sehingga pencapaian pada level impact dan Outcome kadang sulit tercapai. Sebagai solusi alternatif bentuk koordinasi dan pembinaan kepada multipihak yang terkait dalam upaya Penjaminan Sosial akan ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya .
2. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di SKPD untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan. Sebagai solusi alternatif direncanakan pada tahun 2023 akan dibangun sistem data base yang terpadu dan terintegrasi untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.

ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA (ANGGARAN)

$$\text{Persentase efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

$$100\% - \frac{6.395.350.205}{6.422.862.250} \times 100\%$$

$$= 100\% - 0.43\%$$

$$= 99.57\%$$

Dari gambaran diatas diperoleh realisasi anggaran di sasaran Strategis II ini sebesar 99.57%.

SERBA SERBI

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya ketahanan sosial
masyarakat miskin potensial

"TARGET 2022"



"REALISASI 2022"



$71.048 = 70520 + 684 \text{ JIWA}$
 $\text{RTLH} = 71.204 / \text{DATA}$

KELUARGA MISKIN DIBAGI
87.814 DATA KKM YG TELAH
DIVERIFIKASI DI TAHUN
2021

JUMLAH RTLH 228 UNIT

RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

100%

DATA PENERIMA BANSOS 46
DIVERIFIKASI

PENERIMA PKH
BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)
DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)

81%



SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat miskin potensial

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2023
3.	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat miskin potensial	Persentase masyarakat miskin potensial yang memiliki ketahanan sosial	21.00

Tabel Capaian Sasaran startegis 3 tahun 2020-2023

No	Sasaran strategis OPD	Indikator Sasaran Renstra	Tahun			Target	Realisasi
			2020	2021	2022		
3	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat miskin potensial	Persentase Rata-rata Masyarakat Miskin Mandiri Persentase Lembaga Sosial pemberi Layanan Kesejahteraan Sosial	18.79%	14.28%	13.00%	21.00%	20.08%

$$\frac{\text{Jumlah Warga Miskin Potensial yg difasilitasi}}{\text{Jumlah Total Warga Miskin yang Potensial seharusnya ditangani}} \times 100\% = 20.08\%$$

$$\frac{1187}{5910} \times 100\% = 20.08\%$$

Tabel 3.4
Capaian Program / Bidang Pemberdayaan FM dan Kelembagaan Sosial Tahun 2023

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Realisasi Output	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	2	3		5	6	7	8
1.	Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Sosial bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Pemberdayaan Sosial bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT)	687 jiwa KAT + 491 Jiwa KUBE	Rp.710.298.000	Rp.710.298.000	100.00
2			Peningkatan kemampuan potensi sumber Peksos Masyarakat kewenangan kab/kota	15 orang Peksos yg dilatih	Rp.15.045.600	Rp.15.045.600	100.00

Program Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin adalah Program yang menyasar PMKS terkategori Produktif / masih bisa diberdayakan yang mengalami ketidak berdayaan akibat terganggunya fungsi sosial baik oleh lingkungan, keterpencikan wilayah maupun karena yang bersangkutan memang tidak memiliki fasilitas yang mampu mendukung yang bersangkutan untuk bisa menjadi produktif. Contohnya masyarakat terpencil yang akibat wilayahnya jauh dari pusat pemerintahan maupun pusat ekonomi sehingga mengakibatkan kelompok masyarakat ini termarginalkan, meskipun pada dasarnya mereka memiliki potensi yang besar jika difasilitasi. Kegiatan Pemberdayaan bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Polewali Mandar berada di Desa Ienggo Kecamatan Bulo 54 jiwa, Ditahun 2023 ditargetkan semua jiwa dalam komunitas tersebut memperoleh bantuan kegiatan pemberdayaan. Sedangkan bagi Keluarga Miskin Potensial serta Lansia Potensial yang diberdayakan dengan kegiatan bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan penyediaan ditahun 2023 kegiatan ini diharapkan mampu dijalankan dengan metode Bantuan Stimulan sehingga keberlanjutan kegiatan Pemberdayaan tersebut dapat betul betul efektif.

Capaian Sasaran strategis Program Pemberdayaan Sosial ditahun 2023 mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya (tahun 2021). Ditahun 2021 capaian mencapai 14.28% 20.00% yang ditargetkan, sedangkan ditahun 2022 naik ke angka 13.00% dan di tahun 2023 menjadi rendahnya capaian disebabkan faktor yang juga mempengaruhi adalah bahwa kegiatan di Program ini tidak cukup mendukung pencapaian SPM dinas Sosial (tidak masuk dalam indikator) capaian SPM. Langkah-langkah yang dianggap perlu untuk segera dilaksanakan agar capaian di sasaran ini semakin meningkat adalah antara lain;

HAMBATAN / TANTANGAN

1. Masih Rendahnya kesadaran Masyarakat Miskin tentang pentingnya Bantuan Stimulan digulirkan secara terus menerus
2. Belum jelasnya Regulasi Pengalihan kewenangan Penerbitan Rekomendasi BPJS dimasa yang akan datang
3. Jumlah Keluarga Miskin yang layak memperoleh Bantuan Stimulan masih sangat tinggi dan terkonsentrasi di wilayah Pesisir
4. Akses ke lokasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) masih sangat minim baik itu akses Jalan maupun Akses Telekomunikasi
5. Pembinaan berkelanjutan belum dilaksanakan khususnya bagi Keluarga Miskin yang telah menerima bantuan stimulan

SOLUSI

1. Pembinaan berupa Pendampingan kepada Masyarakat / Keluarga Miskin perihal pentingnya kemandirian secara ekonomi lebih di intensifkan
2. Penyaluran Bantuan di wilayah pesisir tempat terkonsentrasi kantong-kantong kemiskinan untuk lebih diintensifkan
3. Regenerasi Pekerja Sosial khususnya TKSK segera dilakukan mengingat perkembangan masalah sosial di lapangan yang semakin beragam
4. Validasi Data PMKS khususnya bagi PMKS Potensial mutlak segera dilakukan agar tidak ada lagi salah sasaran penerima bantuan sosial

ANALISA PENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Indikator Outcome pada Program Pemberdayaan Sosial umumnya bersifat bantuan stimulant / bantuan Pemberdayaan, sementara kegiatan yang dilaksanakan terbatas sebagian besar berupa kunjungan serta monev pelaksanaan pengawasan khususnya bantuan yg dilaksanakan ditahun sebelumnya, sehingga pencapaian pada level impact dan Outcome kadang sulit tercapai. Sementara list proposal calon penerima bantuan semakin bertambah sehingga solusi alternatif yg dinilai mampu menyelesaikan persoalan ini adalah pengajuan proposal ke kementerian sosial melalui dana Dekonsentrasi yg melekat di Provinsi atau melekat di Program Nasional seperti PKH.

ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA (ANGGARAN)

$$\text{Persentase efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

$$100\% = \frac{725.343.600}{725.343.600} \times 100\% \\ = 100\%$$

Dari gambaran diatas diperoleh realisasi anggaran di sasaran Strategis III ini sebesar 100%.

SERBA SERBI

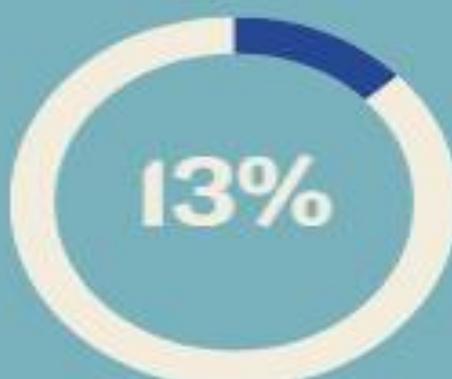
SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat miskin potensial

sasaran strategis 3 ini menasaskan kelompok PPKS Potensial seperti Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT), Keluarga Miskin Potensial yang memiliki usaha serta peningkatan kapasitas bagi PSKS khususnya Pekerja Sosial yg terlibat langsung dalam usaha Kesejahteraan Sosial



TARGET 2022



REALISASI 2022



TUJUAN 2

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

SASARAN STRATEGIS 4

Meningkatnya peran aktif lembaga sosial dalam layanan kesejahteraan sosial

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
4	Meningkatnya peran aktif lembaga sosial dalam layanan kesejahteraan sosial	Persentase lembaga sosial yang aktif dalam pemberian layanan kesejahteraan sosial	100%

Tabel Capaian Sasaran startegis 4 tahun 2020-2023

No	Sasaran strategis OPD	Indikator Sasaran Renstra	Tahun		Target	Realisasi
			2021	2022		
4	Meningkatnya peran aktif lembaga sosial dalam layanan kesejahteraan sosial	Persentase lembaga sosial yang aktif dalam pemberian layanan kesejahteraan sosial	100%	100%	100%	100%

$$\frac{\text{Jumlah Lembaga/Wahana Kesos yang dibina}}{\text{Jumlah Total Jenis Lembaga Sosial yang seharusnya dibina dalam 1 tahun}} \times 100\%$$

$$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$



Tabel 3.5

Capaian Program / Bidang Pemberdayaan FM dan Kelembagaan Sosial Tahun 2023

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Realisasi Output	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	2	3		5	6	7	8
1.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional kewenangan Kab/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional kewenangan Kab/Kota	2 lokasi	36.334.100	36.334.100	100

HAMBATAN / TANTANGAN

1. Luasnya areal yang harus dijaga kondisinya pada setiap pelaksanaan upacara/peringatan hari besar;
2. Kurangnya kepedulian masyarakat sekitar serta kepedulian pemerintah setempat dalam menjaga situs/tempat bersejarah yg berada di wilayahnya
3. Intervensi pihak provinsi dan Pusat yg dinilai belum cukup berperan serta dalam membantu pelestarian situs/ tempat bersejarah

SOLUSI

Adanya sinergi antar stakeholder masyarakat dan Pemerintah dalam ikut menjaga kelestarian situs/tempat bersejarah, pengenalan kepada generasi muda tentang arti penting semangat keperintisan dan kepahlawanan serta kesetiakawanan sosial yang menjadi modal dasar keberlangsungan semangat nilai-nilai nasionalisme yang seharusnya tertanam sedari dulu

ANALISA PENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Indikator Outcome pada Program Pemberdayaan Sosial umumnya bersifat bantuan stimulant / bantuan Pemberdayaan, sementara kegiatan yang dilaksanakan terbatas sebagian besar berupa kunjungan serta monev pelaksanaan pengawasan khususnya bantuan yg dilaksanakan ditahun sebelumnya, sehingga pencapaian pada level impact dan Outcome kadang sulit tercapai. Sementara list proposal calon penerima bantuan semakin bertambah sehingga solusi alternatif yg dinilai mampu menyelesaikan persoalan ini adalah pengajuan proposal ke Kementerian Sosial melalui dana Dekonsentrasi yg melekat di Provinsi atau melekat di Program Nasional seperti PKH.

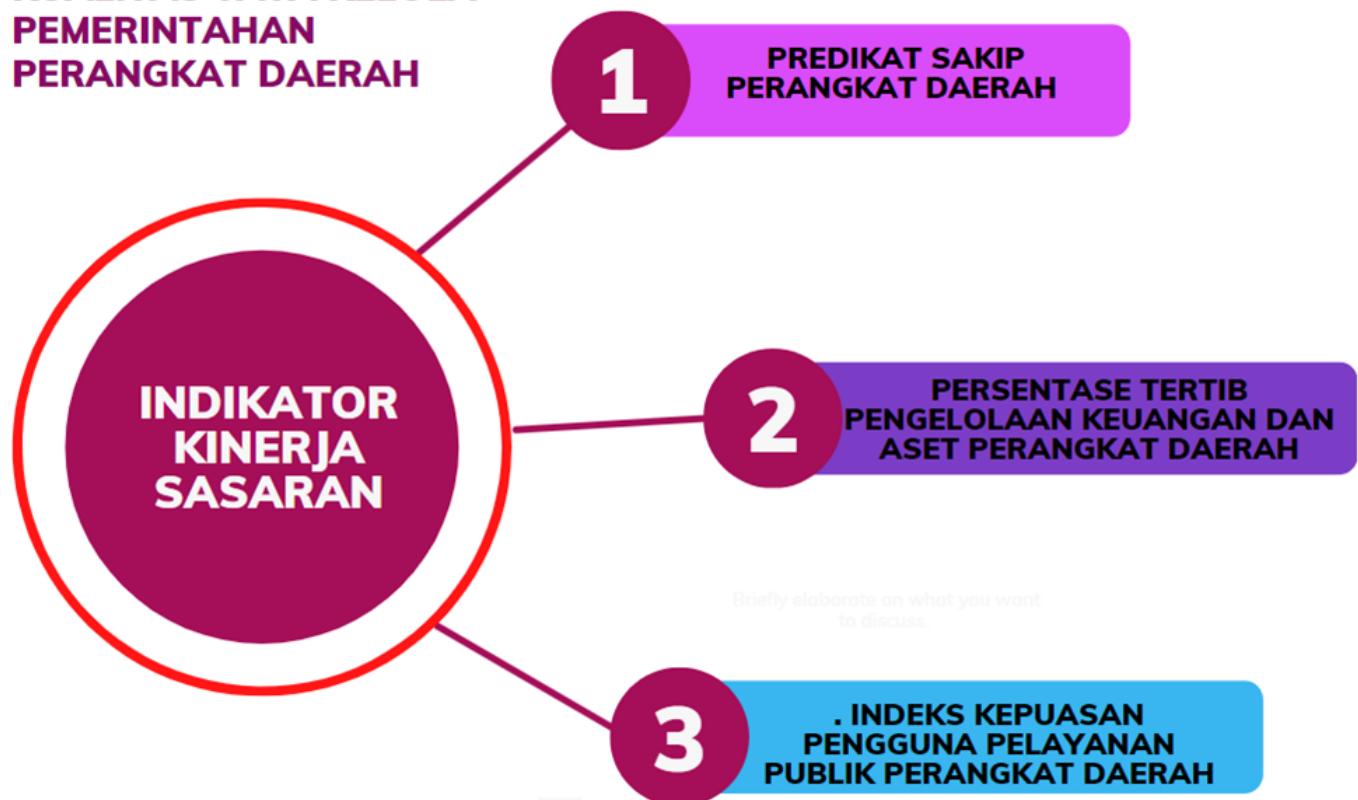
ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA (ANGGARAN)

$$\text{Persentase efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

$$100\% - \frac{36.334.100}{36.334.100} \times 100\% \\ = 100\% - 100\% \\ = 0\%$$

Dari gambaran diatas diperoleh realisasi anggaran di sasaran Strategis IV ini sebesar 0.00% secara teory masih sangat efektif dalam hal efisiensi.

**MENINGKATNYA
KUALITAS TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
PERANGKAT DAERAH**



SASARAN STRATEGIS 5 Indikator 1

Predikat SAKIP perangkat daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023
5.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	1. Predikat SAKIP Perangkat Daerah 2. Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah 3. . Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	A 95,56%	100% Sangat Baik

Adapun Realisasi untuk ke 3 (tiga) Program diatas mencapai 98.88 % (termasuk gaji) angka ini menunjukkan tingkat penyerapan anggaran untuk Program ini sangat maksimal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 09 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Di tahun 2020 Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar mendapat predikat BB dari Inspektorat daerah Kabupaten Polewali Mandar , Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.

	Komponen Yang Dinilai	2021		2020	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	29.10	30	29,10
b.	Pengukuran Kinerja	25	20.94	25	20.94
c.	Pelaporan Kinerja	15	9.27	15	9,00
d.	Evaluasi Internal	10	4.49	10	4,12
e.	Capaian Kinerja	20	12.00	20	12,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	75.80	100	75,16
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB		B

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun **2022**, merupakan salah satu dokumen yang di evaluasi selain Rencana Strategis (Renstra) dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar memperoleh nilai **75,80** atau memperoleh predikat rating **"BB"**. Rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut,

Tabel 3.7

Program/Kegiatan yang mendukung **Predikat SAKIP Perangkat Daerah**

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		% Rp.	SISA
			K	Rp.	K	Rp.		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP perangkat daerah; opini PKPD; IKM						

A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase dok. Perencanaan perangkat daerah yg disusun sesuai standar dan tepat wkt	4	16,230,700	4	16,230,700	100.00	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dok. Kinerja yg dihasilkan	1	1,470,000	1	1,470,000	100.00	-

HAMBATAN / TANTANGAN

1. Masih Rendahnya kesadaran internal lingkungan Dinas Sosial tentang arti pentingnya penerapan akuntabilitas kinerja pada setiap kerja kerja yang dilaksanakan
2. Kurangnya sosialisasi tentang penerapan akuntabilitas kinerja serta komponen penilaian yang melekat didalamnya

SOLUSI

Peningkatan sosialisasi/pemahaman kepada seluruh ASN lingkup Dinas Sosial tentang arti penting Peningkatan kapasitas kerja serta kualitas kinerja dalam pelaksanaan tugas sehari-hari serta memberikan motivasi kerja memalui punishment and reward kepada setip ASN yg berkinerja baik.

ANALISA PENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Masih sulitnya mengimplementasikan penganggaran yang berbasis kinerja pada seluruh aparatur. Sebagai solusi alternatif dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik, selain itu juga diimplementasikan penilaian kinerja PNS melalui penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA (ANGGARAN)

$$\text{Percentase efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

$$100\% - \frac{1,470,000}{1,470,000} \times 100\% \\ = 100\% - 100\% \\ = 1.00\%$$

Dari gambaran diatas diperoleh realisasi anggaran di indikator 1 ini sebesar 0% secara teory sangat efisien.

Indikator 2

Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah

Tabel 3.8

Program/Kegiatan yang mendukung Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		% Rp.	SISA
			K	Rp.	K	Rp.		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP perangkat daerah; opini PKPD; IKM						
A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase PNS perangkat daerah yg berkinerja baik	100	1,592,899,227	100	1,577,167,659	99,01	15,731,568
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS	21	1,590,659,227	100	1,574,927,659	99,01	15,731,568
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jmh Dok. LK akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu	1	2,240,000	1	2,240,000	100.00	
JUMLAH				1,592,899,227		1,577,167,659	91.35	15,731,568

HAMBATAN / TANTANGAN

1. Masih rendahnya pengetahuan keilmuan tentang akuntabilitas keuangan yang benar
2. Penerapan Akuntabilitas Keuangan di setiap kegiatan yang dilaksanakan masih bersifat umum / belum menyeluruh

SOLUSI

Upaya Peningkatan kapasitas / kapalitas Pengelola Keuangan segera dilakukan baik berupa sosialisasi maupun bimtek keuangan

ANALISA PENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2023.
2. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
3. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu atau berorientasi pada hasil.

ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA (ANGGARAN)

$$\text{Persentase efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

$$100\% - \frac{1,577,167,659}{1,592,899,227} \times 100\% \\ = 100\%-99.01\% \\ = 0.99 \%$$

Dari gambaran diatas diperoleh realisasi anggaran di sindikator II ini sebesar 0.99% secara teory efisiens.

Indikator 3

Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah

HAMBATAN / TANTANGAN

1. Kondisi fasilitas pendukung layanan public khususnya di area layanan front office kondisinya sangat memprihatinkan/ kondisi atap gedung yg rubuh
2. Masih rendahnya komitmen pelayanan petugas layanan front office yang melayani langsung masyarakat.

SOLUSI

Upaya Peningkatan kualitas sarana dan prasarana segera dilaksanakan melalui usulan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor pada rencana anggaran tahun depan

ANALISA PENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2022.
2. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu atau berorientasi pada hasil.

ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA (ANGGARAN)

$$\text{Persentase efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

$$100\% - \frac{780,006,105}{791,338,800} \times 100\% \\ = 100\%-98,56\% \\ = 1,44\%$$

Dari gambaran diatas diperoleh realisasi anggaran di indikator III ini sebesar 1,44% secara teory sangat efisien.

Tabel 3.6
Program/Kegiatan yang mendukung Indeks Kepuasan Masyarakat / Stakeholder(IKM)
tahun 2023

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI			% Rp.	SISA
			K	Rp.	K	Rp.	% Rp.		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP perangkat daerah; opini PKPD; IKM	1396	2,418250,727	1389	2,391,186,264	98.88		27,064,463
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase dok. Perencanaan perangkat daerah yg disusun sesuai standar dan tepat wkt	4	16,230,700	4	16,230,500	100.00		200
	Penyusunan Dok. Perencanaan Perangkat Daerah	Jmh Dok. RKA perangkat daerah yg tersusun sesuai standar dan tepat waktu	2	13,010,700	2	13,010,500	100.00		200
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dok. Kinerja yg dihasilkan	1	1,470,000	1	1,470,000	100.00		-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jmh rekomendasi hasil monitoring evaluasi kinerja yg tersusun sesuai standar prosedur	1	1,750,000	1	1,750,000	100.00		-
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase PNS perangkat daerah yg berkinerja baik	100	1,592,899,227	100	1,577,167,659	99,01		15,731,568
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS	25	1,590,659,227	100	1,574,927,659	99,01		15,731,568
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jmh Dok. LK akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu	1	2,240,000	1	2,240,000	100.00		
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Percentase penyampaian laporan Aset sesuai standar dan tepat wkt	1	1,015,000	1	1,015,000	100.00		-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Aset yang disusun	1	1,015,000	1	1,015,000	100.00		-
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase administrasi PD yg tersedia pada PD	204	396,203,500	201	396,016,100	99.95		187,400
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jmh Kom. Instalasi listrik penerangan yg tersedia	7	2,118,700	7	2,118,700	100		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jmlh peralatan dan perlengkapan kantor yg terpelihara	37	155,068,800	36	154,992,500	99.95		76,300

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jmlh makan minum yg tersedia	2	32,696,000	2	32,620,000	99.77	76,000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jmh jenis cetak dan penggandaan yg tersedia	3	19,342,600	3	19,342,600	100.00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jmh jenis bahan bacaan dan perundang-undangan yg tersedia	36	1,440,000	36	1,440,000	100.00	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jmh laporan Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	81	185,537,400	79	185,502,300	100.00	35.100
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tertib ketatausahaan kantor	1073	242,455,550	1073	233,428,205	96.28	9,027,345
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jmh surat masuk dan keluar yg terkelola	1000	937,000	1000	937,500	99.95	500
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jmh jenis kebutuhan komunikasi, air, listrik yg terpenuhi	6	32,998,050	6	32,476,205	98.42	521.845
	Penyediaan Jasa Peralatan & perlengkapan ktr	Jmh jenis perlengkapan gdg ktr yg tersedia	15	17,120,000	15	17,115,000	99.97	5,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jmh tenaga PTT yg di upah	52	191,400,000	52	182,900,000	95.56	8,500,000
F	Pemeliharaan Brg Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tertib ketatausahaan kantor	14	151,664,750	14	149,546,800	98.60	2,117,950
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Randis Jabatan	jmh unit randis yg terpelihara; jmh unit kend yg dilengkapi srt izin	12	105,332,750	12	103,214,800	97.99	2,117,950
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gdg ktr yg terpelihara	2	46,332,000	2	46,332,000	100.00	-

Tabel 3.9
Program/Kegiatan yang mendukung Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		% Rp.	SISA
			K	Rp.	K	Rp.		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP perangkat daerah; opini PKPD; IKM						
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Aset yang disusun	1	1,015,000	1	1,015,000	100.00	-
B	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase administrasi PD yg tersedia pada PD	204	396,203,500	201	396,016,100	99.95	187,400
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jmh Kom. Instalasi listrik penerangan yg tersedia	7	2,118,700	7	2,118,700	99.83	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jmlh peralatan dan perlengkapan kantor yg terpelihara	37	155,068,800	36	154,992,500	99.95	76,300
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jmlh makan minum yg tersedia	2	32,696,000	2	32,620,000	99.77	76,000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jmh jenis cetak dan penggandaan yg tersedia	3	19,342,600	3	19,342,600	100.00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jmh jenis bahan bacaan dan perundang-undangan yg tersedia	36	1,440,000	36	1,440,000	100.00	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jmh laporan Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	81	185,537,400	79	185,502,300	100.00	35.100
C	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase tertib ketatausahaan kantor	1073	242,455,550	1073	233,428,205	96,28	9,027,345
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jmh surat masuk dan keluar yg terkelola	1000	937,000	1000	937,500	99.95	500
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jmh jenis kebutuhan komunikasi, air, listrik yg terpenuhi	6	32,998,050	6	32,476,205	98.42	521.845
	Penyediaan Jasa Peralatan & perlengkapan ktr	Jmh jenis perlengkapan gdg ktr yg tersedia	15	17,120,000	15	17,115,000	99,97	5,000

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jmh tenaga PTT yg di upah	52	191,400,000	52	182,900,000	95.56	8,500,000
D	Pemeliharaan Brg Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase tertib ketatausahaan kantor	14	151,664,750	14	149,546,800	98.60	2,117,950
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Randis Jabatan	jmh unit randis yg terpelihara; jmh unit kend yg dilengkapi srt izin	12	105,332,750	12	103,214,800	97.99	2,117,950
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gdg ktr yg terpelihara	2	46,332,000	2	46,332,000	100.00	-
JUMLAH				791,338,800		780,006,105	98,56	11,332,695

Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar dari tahun ke tahun berupaya meningkatkan kapasitas SDM demi meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat salah satu upaya nyata adalah dengan mengupayakan ketersediaan website OPD sehingga masyarakat umum dapat meng-akses layanan apa saja yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial selama ini. Upaya nyata tersebut dapat kita lihat diantaranya;

- a. Meningkatkan kualitas tata kelola kantor khususnya ketausahaan persuratan, penggandaan penyediaan kelengkapan kantor serta sarana pendukung lainnya;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan public yg berkaitan langsung dengan penyediaan layanan kepada masyarakat / memberikan kemudahan akses serta penyediaan layanan dukungan kepada masyarakat saat berkunjung mengurus administrasi layanan sosial di Dinas Sosial seperti penyediaan ruangan merokok, taman bermain anak serta ruangan laktasi bagi ibu menyusui;
- c. Mengupayakan Rehabilitasi / Perbaikan sarana kantor yang sudah mulai termakan usia seperti perbaikan plafon, Atap yang bocor serta perbaikan sarana pendingin udara yang sudah tidak berfungsi maksimal serta mengupayakan pengadaan sarana olah data yang mumpuni sehingga Dinas Sosial mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik;
- d. Meningkatkan Kompetensi ASN yang tidak berlatar belakang pendidikan Ilmu Sosial dengan mengusulkan yang bersangkutan untuk ikut Diklat Pelayanan Pekerja Sosial yang secara rutin dilaksanakan di Balai Pendidikan dan Latihan BPKKS Makassar sehingga ASN yang bersangkutan dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensinya di Bidang Sosial.

Pelaksanaan Pengukuran Kepuasan Masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar di tahun 2023 dilaksanakan secara mandiri dengan menempatkan kotak partisipasi di beberapa ruangan diantaranya adalah pada Ruang lobi Kantor serta ruang

Pelayanan Penginputan Basis Data Terpadu dimana masing-masing kotak partisipasi terinci sebagai berikut;

1. Di Ruang Lobi terdapat 65 kartu partisipasi (54 Responden) yang menyatakan bahwa layanan dilaksanakan dengan sangat baik **96,77 (Sangat baik)**;
2. Pada Pelayanan Basis Data Terpadu Data Kesejahteraan Sosial terdapat 120 Kartu partisipasi dengan tingkat kepuasan layanan mencapai **90,32 (Sangat baik)**.



Serbaneka Dokumentasi
Pelaksanaan Kegiatan
Pelayanan kepada
Masyarakat lingkup
Dinas Sosial Kabupaten
Polewali Mandar



B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran tahun 2023

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		% Rp.	SISA
			K	Rp.	K	Rp.		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP perangkat daerah; opini PKPD; IKM	1396	2,418,250,727	1389	2,391,186,264	98.88	27,064,463
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase dok. Perencanaan perangkat daerah yg disusun sesuai standar dan tepat wkt	4	16,230,700	4	16,230,500	100.00	200
	Penyusunan Dok. Perencanaan Perangkat Daerah	Jmh Dok. RKA perangkat daerah yg tersusun sesuai standar dan tepat waktu	2	13,010,700	2	13,010,500	100.00	200
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dok. Kinerja yg dihasilkan	1	1,470,000	1	1,470,000	100.00	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jmh rekomendasi hasil monitoring evaluasi kinerja yg tersusun sesuai standar prosedur	1	1,750,000	1	1,750,000	100.00	-
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase PNS perangkat daerah yg berkinerja baik	100	1,592,899,227	100	1,577,167,659	99,01	15,731,568
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS	25	1,590,659,227	100	1,574,927,659	99,01	15,731,568
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jmh Dok. LK akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu	1	2,240,000	1	2,240,000	100.00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Percentase penyampaian laporan Aset sesuai standar dan tepat wkt	1	1,592,899,227	100	1,577,167,659	99,01	15,731,568
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Aset yang disusun	1	1,015,000	1	1,015,000	100.00	-
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase administrasi PD yg tersedia pada PD	204	396,203,500	201	396,016,100	99.95	187,400
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jmh Kom. Instalasi listrik penerangan yg tersedia	7	2,118,700	7	2,118,700	100	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jmlh peralatan dan perlengkapan kantor yg terpelihara	37	155,068,800	36	154,992,500	99.95	76,300
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jmlh makan minum yg tersedia	2	32,696,000	2	32,620,000	99.77	76,000

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jmh jenis cetak dan penggandaan yg tersedia	3	19,342,600	3	19,342,600	100.00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jmh jenis bahan bacaan dan perundang-undangan yg tersedia	36	1,440,000	36	1,440,000	100.00	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jmh laporan Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	81	185,537,400	79	185,502,300	100.00	35.100
D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tertib ketatausahaan kantor	1073	242,455,550	1073	233,428,205	96,28	9,027,345
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jmh surat masuk dan keluar yg terkelola	1000	937,000	1000	937,500	99.95	500
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jmh jenis kebutuhan komunikasi, air, listrik yg terpenuhi	6	32,998,050	6	32,476,205	98.42	521.845
	Penyediaan Jasa Peralatan & perlengkapan ktr	Jmh jenis perlengkapan gdg ktr yg tersedia	15	17,120,000	15	17,115,000	99.97	5,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jmh tenaga PTT yg di upah	52	191,400,000	52	182,900,000	95.56	8,500,000
E	Pemeliharaan Brg Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tertib ketatausahaan kantor	14	151,664,750	14	149,546,800	98.60	2,117,950
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Randis Jabatan	jmh unit randis yg terpelihara; jmh unit kend yg dilengkapi srt izin	12	105,332,750	12	103,214,800	97.99	2,117,950
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gdg ktr yg terpelihara	2	46,332,000	2	46,332,000	100.00	-
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Masyarakat Miskin Potensial yg Diberdayakan	694	725,343,600	84	725,343,600	100	
A	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	jmh KK KAT yg mendapat fasilitas pemberdayaan sosial		710,298,000	84	710,298,000	100	
	Peningkatan kapasitas dan pendampingan KAT	Jmlh KK KAT yg mendptkn fasilitas dayasos	84	710,298,000	84	710,298,000	100	
B	Pengembangan Potensi Sumber Kesos Daerah Kab/Kota	jumlah Masy. miskin potensial yg diberdayakan		15,045,600	110	15,045,600	100	
	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesos klg kewenangan kab/kota	Jlmh PSKS yg diberi ktrmpln		15,045,600	110	15,045,600	100	
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yg ditangani dlm pelayanan rehsos	45	53,460,800	45	53,460,200	97.97	600

A	Rehsos dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gepeng di luar panti sosial	Jmlh PMKS luar panti yg ditangani dlm pelayanan sosial						
	Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS luar panti yg mendptkn peny. Permakanan						
B	Rehsos dasar penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	Jmlh PMKS yg dilayani		53,460,800	45	53,460,200	97.97	600
	Pemberian Bimsos kepada kpd kel. penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	Jumlah ODGJ/WRSE/terlantar yg ditangani	15	53,460,800	45	53,460,200	97.97	600
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase masyarakat miskin penerima penjaminan sosial	87814	6,239,532,800	70520	6,212,145,900	99,56	27,386,900
A	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jmh Data KK dgn tk kesos valid		607,519,000	70520	580,626,500	95,57	26,892,500
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jmlh data KM yg diverifikasi;jmlh KM penerima banpangan yg diverifikasi;jmlh KPM PKH yg diverifikasi;Jmlh RTLH yg direhab		607,519,000	70520	580,626,500	95,57	26,892,500
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yg ditangani	150	339,197,050	150	339,071,905	99.96	125,145
A	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jmlh paket banlog yg disediakan		339,197,050	150	339,071,905	99.96	125,145
	Penyediaan Makanan	Jmlh paket bansos yg disalurkan		339,197,050	150	339,071,905	99.96	125,145
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase lembaga sosial pemberi layanan usaha kesos	2	36,334,100	2	36,334,100	100	-
A	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab./Kota	Jmh TMP yg dikelola		36,334,100	2	36,334,100	100	-
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab./Kota	Jmh TMP yg dikelola	2	36,334,100	2	36,334,100	100	-
JUMLAH				9,812,119,077		9,757,541,969	99,44	54,577,108

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tahun 2023 merupakan tahun yang memberikan tantangan tersendiri bagi Dinas Sosial dalam pencapaian target kinerja tahunan, maupun pencapaian target kinerja 5 tahunan. Keterbatasan anggaran menjadi persoalan klasik dan lagi lagi berulang, hal ini tak mampu dihindari mengingat Pelaksanaan Program/ Kegiatan apapun itu tentu akan mampu di ukur keberhasilannya jika ditopang ketersediaan anggaran yg memadai. Dinas Sosial sebagai peng-ampu urusan Sosial dibebani target capaian SPM yang mampu setidaknya memberikan Pelayanan dan Penanganan Maksimal kepada Kelompok Rentan Lanjut Usia, Anak Luar Panti, Disabilitas serta Masyarakat Korban Bencana Alam Maupun Sosial dinilai belum berada di tingkat yang seharusnya. Isu strategis seperti capaian SPM, Penanganan Stunting serta Percepatan Pengurangan Angka Kemiskinan Ekstrem hingga tahu ke-5 pelaksanaan RPJMD belum juga mampu memberikan dampak secara signifikan. Dan harapannya semoga di tahun yg akan datang Prioritas Anggaran lebih berpihak kepada isu-isu strategis yg dimaksud.

B. Langkah Perbaikan kedepan

Berdasarkan pada pencapaian diatas, masalah prioritas yang memerlukan tindak lanjut segera adalah;

1. Pencapaian Target SPM belum maksimal

Rencana Tindak Lanjut :

Dukungan anggaran yg memadai diharapkan mampu mendukung percepatan pencapaian target SPM, khususnya pada penanganan Disabilitas Terlantar, penyediaan sarana alat bantu sangat-sangat diperlukan hal ini diupayakan dapat terakomodir melalui dana pusat APBN maupun dana dekonsentrasi provinsi serta melalui peran serta pihak swasta seperti program Corporate Social Responsibility (CSR).

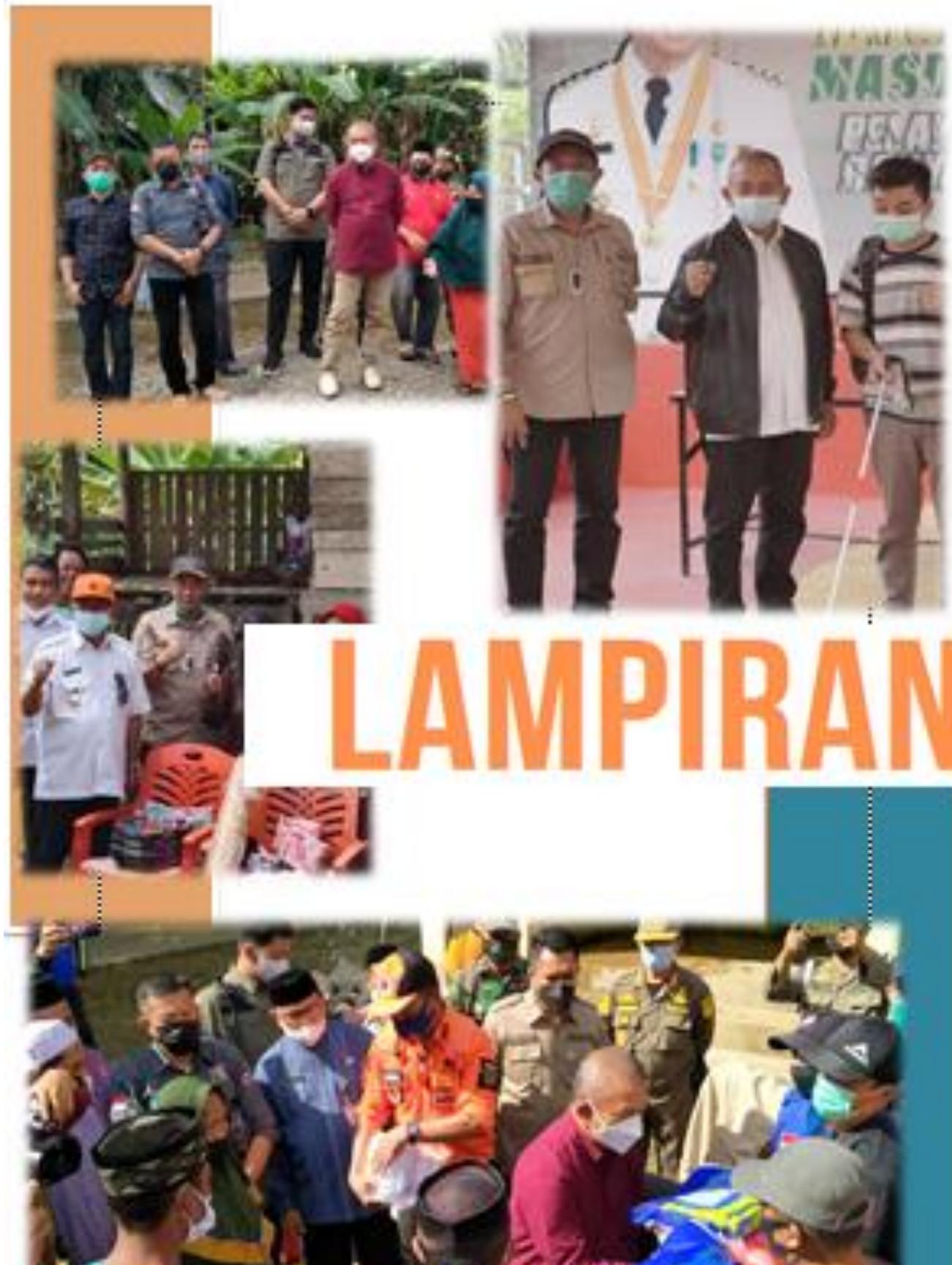
2. Masih rendahnya capaian di Program Pemberdayaan Sosial

Sama hal nya dengan tahun sebelumnya (tahun 2022) tingkat capaian di Program ini sangat rendah akibat sangat terbatasnya Pagu yg dialokasikan untuk Program ini. Hal ini tidak terlepas dari catatan bahwa Program tersebut bukan menjadi Prioritas utama

mengingat program ini tidak menjadi capaian dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) ditambah lagi belum sinkronnya data kemiskinan yang menjadi sasaran prioritas yang akan ditetapkan menjadi Calon Penerima Bantuan yang sifatnya berupa Bantuan Sosial maupun Bantuan yang sifatnya Stimulan.

Rencana Tindak Lanjut :

Penetapan Data Kemiskinan / Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berada ditingkat Desa / Kelurahan yang kemudian ditetapkan sebagai prioritas penerima bantuan sosial





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS SOSIAL

Jl. H. Andi Depu Nomor 147 Polewali, Kode Pos 91313
Telepon. 0428-21025 Faks. 0428-22948

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. AZWAR JASIN, S.Sos., M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ANDI IBRAHIM MASDAR**
Jabatan : Bupati Polewali Mandar

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran kinerja ini, Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerjatersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua,
BUPATI POLEWALI MANDAR,

H. ANDI IBRAHIM MASDAR

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS SOSIAL,

H. AZWAR JASIN, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19730711 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DINAS SOSIAL

NO	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target 2023
1	Meningkatnya ketahanan sosial	Indeks Sosial	43,67%	49,27%
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik	Sangat Baik
3	Meningkatnya ketahanan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang memiliki ketahanan sosial	37.00%	38.00%
4	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat miskin potensial	Persentase masyarakat miskin potensial yang memiliki ketahanan sosial	13,00%	21.00%
5	Meningkatnya ketahanan sosial PMKS non potensial dan masyarakat korban bencana	Persentase PMKS non potensial dan masyarakat korban bencana yang memiliki ketahanan sosial	81,00%	82.00%
6	Meningkatnya peran aktif lembaga sosial dalam layanan kesejahteraan sosial	Persentase lembaga sosial yang aktif dalam pemberian layanan kesejahteraan sosial	100%	100%
7	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	A	A
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100.00%	100.00%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik	Sangat Baik

Keterangan Program Pendukung Sasaran Kinerja :

No	Program	Anggaran	keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,704,833,715	APBD
2	Program Pemberdayaan Sosial	732,230,900	APBD
3	Program Rehabilitasi Sosial	216,740,900	APBD
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	182,754,600	APBD
5	Program Penanganan Bencana	95,906,250	APBD
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	31,549,500	APBD
JUMLAH		3,964,015,865	

Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua
BUPATI POLEWALI MANDAR

H. ANDI IBRAHIM MASDAR

Pihak Pertama
Kepala Dinas Sosial

H. AZWAR JASIN, S.Sos, M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19730711 199203 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.06 SOSIAL					
NO.	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
5	BELANJA	9,812,119,077.00	9,757,541,969.00	99.44	3,629,331,651.00
5.1	BELANJA OPERASI	9,689,773,077.00	9,635,235,969.00	99.44	3,600,268,651.00
5.1.01	Belanja Pegawai	1,590,659,227.00	1,574,927,659.00	99.01	2,105,452,573.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7,395,143,850.00	7,356,338,310.00	99.48	1,444,816,078.00
5.1.05	Belanja Hibah	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	703,970,000.00	703,970,000.00	100.00	3,559,326,100.00
5.2	BELANJA MODAL	122,346,000.00	122,306,000.00	0.00	29,063,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122,346,000.00	122,306,000.00	99.97	29,063,000.00
SURPLUS / (DEFISIT)		(9,812,119,077.00)	(9,757,541,969.00)	99.44	(3,629,331,651.00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SLPA)		(9,812,119,077.00)	(9,757,541,969.00)	99.44	(3,629,331,651.00)

Polewali, 31 Desember 2023
 KEPALA DINAS SOSIAL

H. AZWAR JASIN, S.Sos, M.Si
 NIP : 19730711 199203 1 001